

**EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH
DI KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

NOVI LOVIANA

NIM:2012/1207302

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

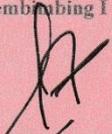
EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN PASAMAN

Nama : Novi Loviana
TM/NIM : 2012/1207302
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

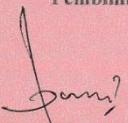
Padang, Agustus 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Drs. Ali Anis, MS
NIP: 19591129 198602 1 001

Pembimbing II


Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP: 19711104 200501 2 001

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan


Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

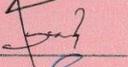
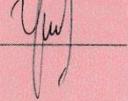
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Program
Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN PASAMAN

Nama : Novi Loviana
TM/NIM : 2012/1207302
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan
Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Drs. Ali Anis, MS	1. 
2.	Sekretaris	: Novya Zulva Riani, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	3. 
4.	Anggota	: Yeniwati, SE, ME	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Loviana
Nim/ Tahun Masuk : 1207302/2012
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Jaya / 15 November 1993
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Cendrawasih No. 4 Air Tawar Barat, Padang
No. HP/telp. : 081267117362
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Pasaman

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2016
Yang Menyatakan



NOVI LOVIANA
Nim/Bp. 1207302/2012

ABSTRAK

Novi Loviana (2012/1207302) : Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Pasaman. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Pasaman terhadap (1) kinerja perekonomian daerah, (2) kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) kinerja pelayanan publik, dan (4) kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini juga membandingkan kinerja Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat pada periode setelah pemekaran.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode indeksasi. Metode Indeksasi digunakan untuk membandingkan kinerja daerah induk sebelum dan setelah pemekaran dan untuk membandingkan kinerja daerah otonom baru dengan daerah induk pada periode setelah pemekaran. Sedangkan indikator-indikator yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemekaran wilayah memiliki dampak yang positif terhadap kinerja ekonomi, kinerja keuangan dan kinerja aparatur di Kabupaten Pasaman. Sedangkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan setelah pemekaran wilayah. (2) kinerja keuangan dan kinerja aparatur kabupaten Pasaman lebih baik di bandingkan daerah Kabupaten Pasaman Barat, (3) kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik Kabupaten Pasaman Barat lebih baik dibandingkan Kabupaten induknya kabupaten Pasaman. Hal ini menunjukkan kinerja daerah otonom baru mampu mengimbangi kinerja daerah induk.

Kata Kunci : pemekaraan wilayah, kinerja ekonomi, kinerja keuangan, kinerja pelayanan publik, kinerja aparatur

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Pasaman”. Shalawat dan salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di samping itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Ali Anis, MS sebagai pembimbing I dan Ibu Novya Zulva Riani,SE,M.Si sebagai pembimbing II yang telah menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi.
6. Untuk antan dan nenek yang selalu memberikan nasihat, mendoakan penulis dan menjadi inspirasi penulis agar selalu menjalani hidup dengan baik dan benar.
7. Untuk wanita-wanita terhebatku (Nunik, Ola, Anis, Lara, Lidia, Sepriyanti, Debbi, Laila, Ria) terimakasih sudah menemani dari awal hingga akhir perjuangan penulis. Terimakasih telah memberikan semangat dan keceriaan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan 2012 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku yang jauh di Salatiga, Nur Latifah dan Filzah Nurina yang selalu memberikan motivasi penulis.
10. Untuk kalian yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih untuk segala hal indah yang kita lewati bersama.

11. Untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Amin.

Padang, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	15
1. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	15
2. Otonomi Daerah	17
3. Pemekaran Daerah	19
4. Indikator Evaluasi Pemekaran Daerah.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Konseptual	30
D. Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	34
F. Defenisi Operasional	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran umum daerah penelitian	42
2. Deskriptif Indeks	44
a. Indeks Kinerja Ekonomi Daerah	45
b. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	48
c. Indeks Kinerja Pelayanan Publik	51
d. Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	55
3. Perbandingan Indeks Kinerja Setelah Kebijakan Pemekaran Wilayah	56
a. Perbandingan Indeks Kinerja Ekonomi	57
b. Perbandingan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	58
c. Perbandingan Indeks Kinerja Pelayanan Publik	59
d. Perbandingan Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	60
B. Pembahasan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman
1.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2000 Daerah Induk dan Daerah Hasil Pemekaran di Sumatera Barat	4
1.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	6
1.3	Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran.....	8
1.4	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	10
1.4	Profesi Guru di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	11
4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2014.....	43
4.2	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2014..	44
4.3	Indeks Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran	46
4.4	Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran.....	48
4.5	Indeks Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran	51
4.6	Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran.....	55
4.7	Indeks Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran.....	57
4.8	Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	56
4.9	Indeks Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	59

4.10	Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	60
4.11	Gabungan Indeks Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Data Kinerja Ekonomi Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran	71
2. Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran.....	72
3. Data Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran	73
4. Data Kinerja Aparatur Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Pemekaran	74
5. Data Kinerja Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	75
6. Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	76
7. Data Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran.....	77
8. Data Kinerja Aparatur Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan manusia baik material maupun spiritual. Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan pembangunan ekonomi cenderung mendapat prioritas dari pembangunan lainnya karena pembangunan bidang ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi pembangunan di bidang lainnya (Hermawati,2007:13).

Pembangunan selama ini yang perencanaannya dominan menggunakan pendekatan secara *Top Down*, dinilai telah banyak menimbulkan kegagalan mulai dari kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produktif yang ada di daerah-daerah, rendahnya kinerja ekonomi hingga kegagalan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat hampir tidak mungkin memiliki informasi selengkap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat (Hermawati,2007:13).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32/2004 tentang otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah

memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah masing-masing.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No.22/1999 disebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu daerah berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi daerah memberikan pelimpahan wewenang baik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan pembiayaan kepada daerah dan berusaha melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah sehingga kohesi sosial antara politik dan masyarakat semakin kuat.

Dalam laporan BAPPENAS (2008) menemukan bahwa proses pemekaran daerah terus berlangsung hampir setiap tahun dan telah menghasilkan 222 daerah otonom baru. Hasil studi tersebut juga mengungkapkan bahwa setelah lima tahun dimekarkan, ternyata kondisi daerah otonom baru juga secara umum masih tetap berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol. Dari sisi ekonomi, penyebab ketertinggalan daerah otonom baru dari daerah lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam, juga keterbatasan sumber daya manusia (penduduk miskin cukup banyak), dan belum maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui investasi publik.

Masalah-masalah yang dihadapi pada aspek ekonomi cukup beragam dan belum kondusif dalam menggerakkan investasi, pola belanja aparatur, dan

pembangunan yang belum sepenuhnya mendukung perekonomian lokal karena keterbatasan berbagai infrastruktur penunjang ekonomi maupun penunjang fasilitas pemerintahan.

Di sisi lain, beberapa argumen diajukan untuk mendukung pemekaran daerah, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang tata cara pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada 7 (tujuh) persyaratan, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dengan persyaratan tersebut, diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam mencapai keberhasilan pemekaran wilayah. Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat, selain itu dengan adanya pemekaran daerah maka tuntutan akan mutu dari pelayanan yang diberikan pemerintah makin meningkat.

Tabel 1.1**Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2000 Daerah Induk dan Daerah Hasil Pemekaran di Sumatera Barat**

No	Daerah	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Pasaman	1.289.261,25	1.368.459,76	1.452.571,40	1.541.992,76	1.636.516,09
2	Kabupaten Pasaman Barat	2.544.771,31	2.707.342,74	2.881.110,75	3.067.381,19	3.268.006,04
3	Kabupaten Solok	2.047.056,55	2.170.836,33	2.303.828,56	2.448.011,41	2.602.065,71
4	Kabupaten Solok Selatan	614.807,23	653.437,94	695.409,87	740.174,46	787.260,83
5	Kabupaten Sijunjung	1.271.638,27	1.343.278,00	1.420.360,12	1.506.769,93	1.599.143,38
6	Kabupaten Dharmasraya	1.087.775,99	1.158.557,51	1.234.376,14	1.316.135,71	1.402.405,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Dari Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga Kabupaten di Sumatera Barat mengalami pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Dari ketiga daerah hasil pemekaran dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah hasil pemekaran memiliki total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih tinggi dari daerah induknya yaitu Kabupaten Pasaman. Hal berbeda yang dialami oleh daerah hasil pemekaran lainnya yaitu Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya yang memiliki total PDRB yang lebih rendah dari Kabupaten induknya. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kebijakan pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Kabupaten Pasaman yang turut mengalami pemekaran daerah dimana terbentuknya daerah administratif baru yaitu Kabupaten Pasaman Barat melalui Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan pada 18 Desember 2003 diresmikan

Kabupaten Pasaman Barat sebagai Kabupaten baru di Indonesia. Dampak dari kebijakan pemekaran tersebut mungkin saja akan mempengaruhi struktur dan kondisi perekonomian di Kabupaten induknya dalam hal ini Kabupaten Pasaman. Sektor-sektor yang menjadi unggulan sebelum terjadi pemekaran akan berubah dan berganti setelah terjadinya pemekaran. Semua potensi sumberdaya alam yang ada tentunya akan mampu untuk terus dikembangkan sehingga meningkatkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Kabupaten Pasaman akan lebih bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran

Tahun	Kabupaten Pasaman				Kabupaten Pasaman Barat			
	PDRB (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Rasio PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	PDRB/Kapita (Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Rasio PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	PDRB/Kapita (Rupiah)
2004	967.925,45	5,26	3,51	4.138.555,88	1.866.612,80	6,47	6,77	5.537.940,83
2005	1.022.262,67	5,61	3,51	4.313.271,80	1.988.702,87	6,54	6,82	5.822.394,45
2006	1.081.242,18	5,77	3,49	4.502.005,59	2.115.152,38	6,36	6,83	6.110.984,76
2007	1.145.234,55	5,92	3,48	4.705.598,84	2.250.818,83	6,41	6,84	6.417.214,77
2008	1.214.884,17	6,08	3,47	4.925.978,43	2.394.934,54	6,40	6,84	6.738.094,88
2009	1.289.261,25	6,12	3,51	5.158.633,87	2.544.771,31	6,26	6,94	7.065.296,17
2010	1.368.459,76	6,14	3,52	5.403.357,65	2.707.342,74	6,39	6,97	7.417.580,60
2011	1.452.571,40	6,15	3,52	5.641.053,98	2.881.110,75	6,42	6,98	7.676.820,55
2012	1.541.992,76	6,16	3,51	5.914.816,89	3.067.381,19	6,47	6,98	7.983.813,61
2013	1.636.516,09	6,13	3,51	6.203.624,28	3.268.006,04	6,54	7,01	8.317.653,46
Rata-Rata	1.272.035,03	5,93	3,50	5.090.689,72	2.508.483,35	6,43	6,90	6.908.779,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Pada Tabel 1.2 di atas, dapat di lihat bahwa PDRB Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 hingga tahun 2013 periode setelah mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman sebagai daerah induk pemekaran menunjukkan indikasi positif bahwa pemekaran wilayah mampu menggali potensi-potensi yang ada dalam struktur perekonomian di Kabupaten Pasaman.

Dari sisi lain, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman juga menunjukkan gejala yang cukup baik, peningkatan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi pada tahun periode setelah pemekaran, hanya saja penurunan terjadi pada tahun 2013 menjadi 6,13 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,16 persen. Sedangkan di daerah hasil pemekarannya yaitu Kabupaten Pasaman Barat, peningkatan laju pertumbuhan terjadi pada tahun 2004 hingga tahun 2013. Tetapi jika di lihat rata-rata keseluruhan dari tabel laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2009 hingga tahun 2013, Kabupaten Pasaman Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Pasaman yaitu sebesar 6,43 persen.

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2004 hingga 2013 cenderung mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada tahun 2009 dan 2010 yaitu sebesar 3,51 persen dan 3,52 persen. Kabupaten Pasaman Barat memiliki angka rasio yang lebih besar dan

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2012 tidak mengalami perubahan angka rasio dari tahun sebelumnya yaitu tetap berada di angka 6,98 persen.

Jika dilihat pada Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan gejala yang cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Pasaman mampu meningkatkan nilai rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapitanya mencapai angka Rp 5.090.689,72 setelah kebijakan pemekaran. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat mampu memiliki nilai rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp 6.908.779,41. Jika dibandingkan antara kedua wilayah tersebut, nilai rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pasaman Barat memiliki angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah induk pemekarannya yaitu Kabupaten Pasaman.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat Setelah Pemekaran

Tahun	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
	PAD (Juta Rupiah)	PAD (Juta Rupiah)
2004	12.153,57	-
2005	8.391,41	12.444,34
2006	11.978,31	14.292,73
2007	14.227,54	18.311,90
2008	24.020,20	21.021,16
2009	22.909,00	24.320,00
2010	17.696,42	28.067,83
2011	22.004,71	29.399,71
2012	25.544,18	33.701,79
2013	32.140,31	42.545,21
2014	40.303,02	51.054,26
2015	58.048,35	70.243,32

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Dapat di lihat pada Tabel 1.3 di atas, sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2015 setelah pemekaran wilayah, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pasaman mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hanya pada tahun 2005 dan tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp. 8.391,41 juta rupiah dan Rp. 17.696,42 juta rupiah. Di Kabupaten Pasaman Barat, dapat di lihat bahwa pada tahun 2004 hingga 2015 pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan daerah induknya Kabupaten Pasaman.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik, dapat di lihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud meliputi ketersediaan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan balai pengobatan dalam suatu wilayah. Pada Tabel di bawah ini merupakan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 1.4
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
Setelah Pemekaran

Tahun	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
	Jumlah (Unit)	Jumlah (Unit)
2004	94	-
2005	48	51
2006	48	55
2007	48	55
2008	58	56
2009	55	67
2010	57	69
2011	57	58
2012	60	58
2013	68	57
2014	68	60

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Pada Tabel 1.4 di atas dapat dilihat pada awal terjadinya pemekaran wilayah yaitu tahun 2004, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Pasaman sebanyak 94 unit. Pada tahun-tahun selanjutnya tidak banyak mengalami perubahan, Penurunan fasilitas kesehatan hanya terjadi pada tahun 2005 setelah terbaginya fasilitas kesehatan dengan Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 48 dari sebelumnya sebanyak 94 unit fasilitas kesehatan pada tahun 2004.

Sedangkan di daerah Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, fasilitas kesehatan tidak banyak mengalami perubahan hanya saja terlihat pada tahun 2011 dan 2013 terjadi penurunan fasilitas kesehatan. Jika dibandingkan antara kedua wilayah tersebut, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan belum optimalnya upaya daerah dalam menyediakan fasilitas layanan publik di bidang kesehatan.

Dalam evaluasi pemekaran wilayah, aparatur pemerintah perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa jauh ketersediaan aparatur dapat memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu indikator kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu jumlah aparatur yang berprofesi sebagai guru di suatu daerah.

Tabel 1.5
Profesi Guru di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
Setelah Pemekaran

Tahun	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat
	Jumlah	Jumlah
2004	2579	2678
2005	2783	3061
2006	3111	3326
2007	3427	3876
2008	3527	3970
2009	4104	4086
2010	3471	4210
2011	3615	4432
2012	4386	5118
2013	4386	5119
2014	4453	5067

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Dari Tabel 1.5 dapat di lihat bawa pada periode setelah pemekaran 2004-2014 jumlah profesi guru di Kabupaten Pasaman maupun di Kabupaten Pasaman Barat cenderung mengalami peningkatan. Jumlah guru di Kabupaten Pasaman sempat menurun menjadi 3471 orang guru pada tahun 2010. Setelah terjadi pemekaran dengan Kabupaten Pasaman Barat, hal itu tidak berdampak pada jumlah profesi guru yang tersedia di Kabupaten Pasaman. Peningkatan jumlah profesi guru terus terjadi pada tahun setelah terjadinya pemekaran, kecuali pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tetap sebanyak 4386 orang guru. Di daerah

Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2004 hingga 2014, jumlah profesi guru mengalami penurunan pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya menjadi 5067 orang guru.

Dalam laporan BAPPENAS (2008) dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sebenarnya bergantung pada dua hal, yang pertama adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan yang kedua adalah melihat kondisi yang langsung diterima oleh daerah dan masyarakat, baik sebagai dampak langsung pemekaran daerah itu sendiri maupun disebabkan karena adanya perubahan sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu evaluasi '*output*' akan difokuskan kepada aspek kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan hidupnya, yakni sisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik, maka secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan.

Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi difokuskan pada: perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik serta aparatur pemerintah daerah.

Keempat aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Secara teoritis, pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru, yang pada gilirannya membutuhkan aparatur untuk menjalankannya. Dalam tugas menjalankan fungsi pemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola

keuangan yang ada, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini harus dilakukan melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya hal ini akan kembali kepada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi, juga kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, pemekaran wilayah selalu dibayangi oleh tingginya tuntutan dan harapan masyarakat akan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal tersebut tidak lepas dari tujuan pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemekaran dengan fakta yang terjadi di lapangan menjadi hal yang harus dipertanyakan dan diteliti lebih lanjut.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pemekaran wilayah di Kabupaten Pasaman perlu dibandingkan dengan daerah hasil pemekarannya yaitu Kabupaten Pasaman Barat dengan mengevaluasi beberapa fokus kinerja, sedangkan pemilihan indikator kinerja menggunakan indikator yang mencerminkan fokus tiap-tiap kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 129 tahun 2000 tentang “Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah”. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Pasaman”** Kajian tentang sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam bidang perekonomian

daerah, keuangan daerah, pelayanan publik serta aparatur pemerintah daerah sebelum dan setelah terjadinya pemekaran perlu untuk dilakukan guna mengukur kesungguhan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemekaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejuahmana pemekaran wilayah berdampak pada kinerja perekonomian daerah di Kabupaten Pasaman ?
2. Sejuahmana pemekaran wilayah berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman ?
3. Sejuahmana pemekaran wilayah berdampak pada kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pasaman ?
4. Sejuahmana pemekaran wilayah berdampak pada kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pemekaran wilayah berdampak pada kinerja perekonomian daerah di Kabupaten Pasaman.
2. Pengaruh pemekaran wilayah berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman.
3. Pengaruh pemekaran wilayah berdampak pada kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pasaman.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Istilah Pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama (Todaro dan Smith, 2004:19). Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2005:46).

Teori klasik Adam Smith menyatakan bahwa agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang terbaik untuk dilaksanakan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya dimanfaatkan. Walaupun ada pengangguran hal itu bersifat sementara. Pemerintah tidak perlu mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.

Dalam kerangka ekonomi wilayah, ada pandangan Smith yang tidak bisa diterapkan sepenuhnya, misalnya tentang lokasi dari kegiatan ekonomi tersebut. Sesuai dengan tata ruang yang berlaku maka lokasi dari berbagai kegiatan sudah diatur dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus memilih di antara lokasi yang diperkenankan (Tarigan, 2005:48).

Keynes mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung. Walaupun berbeda, pandangan Smith dan Keynes sependapat bahwa salah satu tugas negara adalah menciptakan distribusi pendapatan yang tidak terlalu pincang (ada kaitan dengan tingkat saving dan konsumsi) sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mantap dan berkelanjutan.

Teori Harrod Domar muncul untuk melengkapi Teori Keynes, yang melihat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Harrod Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap, dimana seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar, hanya dapat tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan yaitu $g = k = n$, dimana g adalah tingkat pertumbuhan output (growth), k adalah tingkat pertumbuhan modal (capital), dan n adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja (Tarigan,2005:49).

Teori Harrod Domar sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang masih terbelakang dan terpencil atau hubungan keluarannya sangat sulit.

Untuk wilayah seperti itu, bagi sektor yang hasil produksinya tidak layak atau kurang menguntungkan untuk diekspor maka peningkatan produksi mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar lokal dan tingkat harga turun drastis sehingga merugikan produsen. Oleh karena itu, lebih baik mengatur pertumbuhan berbagai sektor secara seimbang. Dengan demikian, penambahan produksi di satu sektor dapat diserap oleh sektor lain yang tumbuh secara seimbang (Tarigan,2005:52).

Dalam paham neoklasik melihat peran kemajuan teknologi/inovasi sangat besar dalam memacu pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong terciptanya kreativitas dalam kehidupan masyarakat agar produktivitas per tenaga kerja terus meningkat. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (steady growth), diperlukan suatu tingkat *s* (saving) yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah tersebut (Tarigan,2005:53).

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dan sistem dekonsentrasi dan desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saingdaerah dalam proses pertumbuhan (Widjaja, 2004:76).

a. Keuntungan Dari Sistem Otonomi Daerah

Dengan sistem Otonomi Daerah, masyarakat dapat menyediakan jasa pelayanan yang berbeda-beda dengan tingkatan yang berbeda pula yang sesuai dengan prefensi masyarakat yang bersangkutan, penduduk akan bebas berpindah tempat tinggal ke daerah yang sesuai dengan keinginannya. Juga proses politik akan lebih cepat, sederhana dan efisien dengan pemerintah daerah; dan akhirnya eksperimen dan inovasi lebih banyak terjadi dengan sistem otonomi daerah. Pendekatan yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada akan dapat

dibandingkan secara langsung antara pemerintah daerah yang semacam (Suparmoko,2002:19).

b. Kerugian Sistem Otonomi Daerah

Dalam hal-hal tertentu pemerintah daerah akan kurang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal pertahanan dan keamanan apabila hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar. Dalam hal redistribusi pendapatan, pemerintah daerah juga tidak akan efisien dalam mengusahakannya.

Redistribusi pendapatan biasanya ditempuh dengan mengenakan pajak pada kelompok kaya dengan memberikan subsidi kepada kelompok berpenghasilan rendah. Dalam kaitannya dalam tujuan ekonomi makro, jelas pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakannya; khususnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Pemerintah daerah tidak dapat menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Demikian pula kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesempatan kerja dan harga tidak akan banyak berpengaruh dalam suatu daerah (Suparmoko,2002:21).

3. Pemekaran Daerah

Menurut (Sjafrizal:2008) terdapat beberapa hal dimana faktor pemicu pemekaran daerah sebagai berikut :

- a. Perbedaan Agama yaitu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari satu negara atau daerah yang telah ada menjadi suatu negara atau daerah baru.

- b. Perbedaan Etnis dan Budaya, sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis (suku bangsa) dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah.
- c. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah, aspek ini juga termasuk dalam ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi dan gas alam yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ketimpangan ini akan cenderung membawa kedalam kecemburuan sosial yang akhirnya terjadi keinginan untuk melakukan pemekaran daerah.
- d. Luas Daerah, alasannya adalah wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan merata keseluruh pelosok daerah.

Selain faktor pemicu pemekaran tersebut juga dapat di lihat faktor kelayakan pemekaran yaitu :

- a) Kemampuan Keuangan Daerah
Tidak dapat disangkal bahwa hal pertama yang diperlukan dalam menentukan kelayakan pemekaran daerah suatu daerah adalah menyangkut keuangan daerah bersangkutan.
- b) Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Alasannya bila pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan masih rendah, maka pemekaran dikhawatirkan justru akan menyebabkan semakin menurunnya pertumbuhan daerah bersangkutan.
- c) Kualitas Sumberdaya Manusia
Bila kualitas sumberdaya manusia masih rendah di daerah bersangkutan, maka pemekaran daerah tersebut bisa berakibat kurang lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik daerah bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 129 tahun 2000 tentang “Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah” pada BAB II Pasal 2 menyatakan bahwa pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

- (a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (b) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- (c) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- (d) percepatan pengelolaan potensi daerah;
- (e) peningkatan keamanan dan ketertiban;
- (f) peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Syarat-syarat pembentukan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 129 tahun 2000 pada BAB III Pasal 3 mengatakan bahwa daerah dibentuk berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kemampuan ekonomi adalah cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari produk domestik regional bruto (PDRB) dan penerimaan daerah.
- 2) Potensi daerah adalah cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari: lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
- 3) Sosial budaya yaitu cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari: tempat peribadatan, tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya, dan sarana olah raga.

- 4) Sosial politik adalah cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari: partisipasi masyarakat dalam berpolitik, organisasi kemasyarakatan.
- 5) Jumlah penduduk yaitu jumlah tertentu penduduk suatu daerah.
- 6) Luas daerah merupakan luas tertentu suatu daerah.
- 7) Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya Otonomi Daerah yang dapat diukur dari: keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, Propinsi yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan atau Kota, Kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan.

4. Indikator Evaluasi Pemekaran Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan” dijelaskan bahwa definisi evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standard. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan atau indikator/sasaran kinerja hasil untuk program. Evaluasi bertujuan untuk melihat keberhasilan suatu

program atau kegiatan berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan masukan ataupun keluaran program tersebut.

Dalam laporan yang dibuat oleh BAPPENAS (2008), landasan evaluasi pemekaran wilayah ditentukan berdasarkan tujuan atau rencana awal dari pemekaran itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.129/2000, tujuan pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat indikator evaluasi kinerja pemekaran daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemekaran yaitu: (1) kinerja ekonomi daerah, yang ditunjukkan dengan indeks kinerja ekonomi daerah, (2) kinerja keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan indeks kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) kinerja pelayanan publik, yang ditunjukkan dengan indeks kinerja pelayanan publik, dan (4) kinerja aparatur pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan indeks kinerja aparatur pemerintah daerah.

a. Indikator Kinerja Ekonomi Daerah

Kinerja ekonomi daerah setidaknya dapat di lihat dari dua hal yaitu melalui angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber penciptaan lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung proses pemerataan antar daerah. Dalam ruang lingkup daerah, pertumbuhan ekonomi dapat di lihat dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dan PDRB per kapita.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Namun pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita tidak cukup menggambarkan kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan. Dalam Studi Evaluasi Pemekaran Daerah (BAPPENAS,2008) disebutkan setidaknya ada 4 indikator yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah, diantaranya :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini menunjukkan gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah.

2. Pertumbuhan PDRB per kapita

Indikator ini mencerminkan pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang membaik.

3. Rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu

wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah.

4. Persentase Penduduk Miskin

Baiknya kinerja ekonomi dapat di lihat dari jumlah angka kemiskinan di daerah yang bersangkutan. Kinerja ekonomi yang baik akan menciptakan pembangunan ekonomi yang seharusnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

b. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah (kabupaten) dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks pemekaran daerah ini menggunakan indikator-indikator kinerja keuangan. Indikator-indikator yang dimaksud adalah:

1. Ketergantungan Fiskal

Indikator ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana Alokasi Umum (yang sudah dikurangi Belanja Pegawai) dalam Total Pendapatan anggaran daerah.

2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan

Indikator ini dinyatakan sebagai persentase dari PDRB kabupaten yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (*income generation*) masing-masing daerah.

3. Proporsi Belanja Modal

Indikator ini menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah pada manfaat jangka panjang, sehingga memberikan multiplier yang lebih besar terhadap perekonomian.

4. Kontribusi Sektor Pemerintah

Indikator ini menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian.

c. Indikator Kinerja Pelayanan Publik

Evaluasi kinerja pelayanan publik akan difokuskan kepada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Indikator kinerja pelayanan publik yang dirumuskan dalam studi ini akan lebih menitikberatkan perhatiannya pada sisi input pelayanan publik itu sendiri. Indikator yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jumlah Siswa per Sekolah

Indikator ini mengindikasikan daya tampung sekolah di satu daerah. Rasionya dibedakan antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP dan tingkat lanjutan SLTA.

2. Jumlah Siswa per Guru

Indikator ini menyangkut ketersediaan tenaga pendidik. Indikator ini dibedakan juga atas pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan tingkat lanjut (SLTA). Rasio siswa per guru ini juga dibedakan antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP dan tingkat lanjutan SLTA.

3. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk. Fasilitas kesehatan dimaksud adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan balai pengobatan.

4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, tenaga paramedis dan pembantu paramedis.

5. Kualitas infrastruktur

Indikator ini menyangkut besarnya persentase panjang jalan dengan kualitas baik, terhadap keseluruhan panjang ruas jalan di kabupaten yang bersangkutan.

d. Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah menjadi hal pokok yang dievaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh ketersediaan aparatur dapat memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Semakin banyak jumlah aparatur yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik,

semakin baik pula ketersediaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam evaluasi pemekaran daerah terdapat dua indikator utama yang dapat menunjukkan ketersediaan dan kualitas aparatur pemerintah, yaitu:

1. Kualitas Pendidikan Aparatur

Tingkat pendidikan merefleksikan tingkat pemahaman dan pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur, semakin besar pula potensi untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah aparatur yang berpendidikan minimal sarjana, dalam total jumlah aparatur (PNS).

2. Persentase Aparatur Pendidik

Indikator ini mencerminkan seberapa besar fungsi pelayanan masyarakat di bidang pendidikan berpeluang untuk dijalankan. Data yang digunakan dalam studi ini adalah jumlah aparatur yang berprofesi guru dalam total jumlah aparatur (PNS) di satu daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Programme (UNDP) 2008 tentang Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 menunjukkan bahwa setelah lima tahun dimekarkan tingkat kemiskinan berkurang namun justru terkonsentrasi di daerah otonom baru. Dalam aspek pelayanan publik, belum lebih baik dibandingkan daerah induknya. Begitupun dalam aspek

kinerja ekonomi, keuangan daerah dan aparatur daerah. Daerah otonom baru masih berada di bawah daerah induk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan yaitu metode indeksasi sedangkan perbedaannya adalah wilayah studi evaluasi yang digunakan. Pada penelitian terdahulu memilih beberapa wilayah studi di Indonesia sedangkan penelitian ini memilih wilayah Kabupaten Pasaman.

Ratri Furry Pustika Rachim (2013) tentang Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik Kota Serang lebih baik dibandingkan kinerja ekonomi Kabupaten induknya. Rata-rata indeks kinerja Kota Serang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten induknya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan yaitu metode indeksasi sedangkan perbedaannya adalah pemilihan wilayah studi evaluasi yang digunakan dan perhitungan indeks evaluasi dampak kinerja. Pada penelitian terdahulu mengevaluasi kinerja perekonomian dan kinerja pelayanan publik, sedangkan penelitian ini mengevaluasi kinerja perekonomian, keuangan, pelayanan publik, dan aparatur.

Susanti (2014) tentang Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa ada pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Utara dari pertanian

menjadi industri pengolahan dan kesejahteraan Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan terlihat dari meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah dan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang dimekarkannya. Menurut para pakar dampak paling utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan ekonomi sementara masyarakat merasakan peningkatan kualitas infrastruktur lebih dominan daripada kesejahteraan ekonomi lalu peningkatan kualitas aparatur.

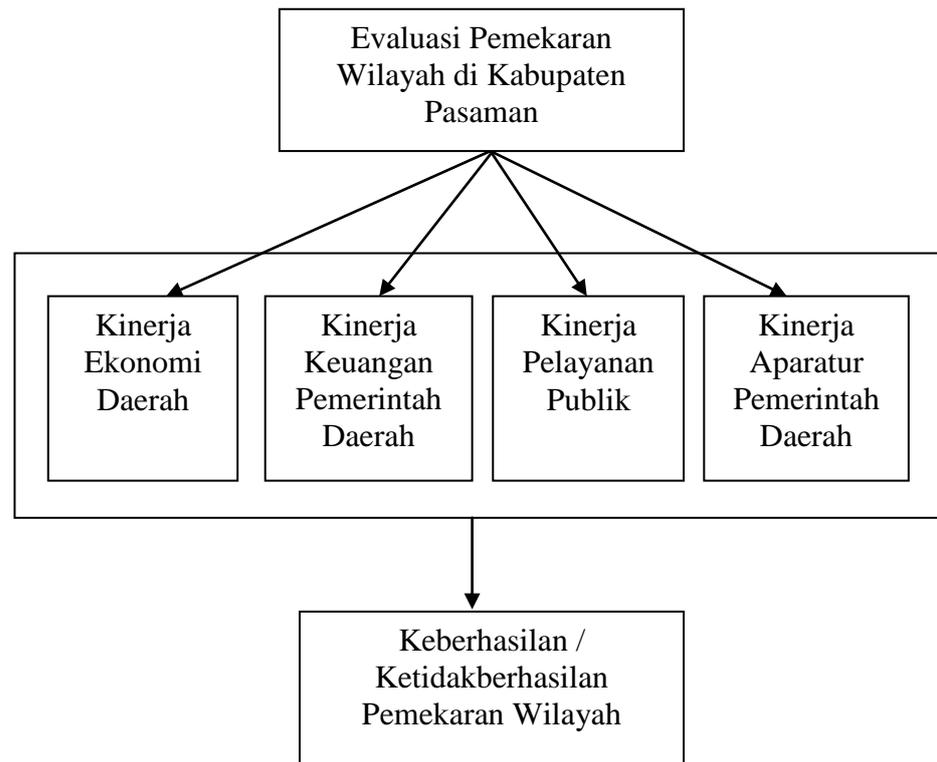
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan yaitu metode indeksasi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP).

C. Kerangka Konseptual

Pemekaran wilayah yang telah berlangsung sejak tahun 1999 memiliki tujuan jelas yang disahkan dalam undang-undang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diupayakan melalui berbagai cara diantaranya melalui percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

Pemekaran wilayah yang sering terjadi belakangan ini umumnya dilatarbelakangi oleh kuatnya keinginan masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi daerah secara mandiri dan mengurangi jarak atau rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat yang menyebabkan ketidakmerataan pelayanan publik. Sistem pemerintahan yang lebih kecil diharapkan mampu mempermudah pemerintah dalam melayani masyarakat maupun mengatur urusan daerah.

Secara umum, pemekaran wilayah menumbuhkan harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik khususnya dalam hal kinerja ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, maupun hal-hal lain yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Perwujudan masyarakat yang sejahtera sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam melaksanakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kinerja daerah setelah pemekaran perlu dikaji untuk melihat sejauh mana pemekaran daerah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kinerja daerah dapat di lihat dari nilai indeks yang dihitung setiap tahun setelah daerah tersebut dimekarkan. Nilai indeks didapat berdasarkan perhitungan beberapa indikator yang berhubungan dengan kinerja ekonomi daerah tersebut. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian teori dan kerangka konseptual di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Adanya keberhasilan pemekaran wilayah di Kabupaten Pasaman berdasarkan kinerja perekonomian daerah.
2. Adanya keberhasilan pemekaran wilayah di Kabupaten Pasaman berdasarkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Adanya keberhasilan pemekaran wilayah di Kabupaten Pasaman berdasarkan kinerja pelayanan publik.
4. Adanya keberhasilan pemekaran wilayah di Kabupaten Pasaman berdasarkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemekaran wilayah memiliki dampak yang positif terhadap kinerja ekonomi, kinerja keuangan dan kinerja aparatur di Kabupaten Pasaman. Sedangkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan setelah pemekaran wilayah.
- 2) Berdasarkan perbandingan nilai indeks kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dan kinerja aparatur kabupaten Pasaman lebih baik di bandingkan daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- 3) Berdasarkan perbandingan nilai indeks kinerja daerah induk dan daerah otonom baru, dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik Kabupaten Pasaman Barat lebih baik dibandingkan Kabupaten induknya kabupaten Pasaman. Hal ini menunjukkan kinerja daerah otonom baru mampu mengimbangi kinerja daerah induk.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya untuk mendorong pemerataan pertumbuhan pada semua sektor perekonomian yang ada untuk meningkatkan perekonomian di kedua daerah tersebut dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada

di daerahnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Keputusan untuk memekarkan suatu daerah harus dilakukan dengan hati-hati. Sangat penting untuk mempersiapkan suatu daerah yang menginginkan pemekaran.
3. Diperlukan ketegasan dari pemerintah pusat dalam hal pemekaran suatu wilayah. Ketegasan juga diperlukan dalam hal evaluasi terhadap wilayah yang saat ini telah telah menjadi daerah otonom baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nation Development Programme, 2008. "Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007." BRIDGE, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat Dalam Angka (1999-2015)*. Propinsi Sumatera Barat : BPS, Padang.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2016*. Propinsi Sumatera Barat : BPS, Padang.
- Direktorat Jendertal Perimbangan Keuangan. Diunduh dari <http://www.djpk.depkeu.go.id> pada tanggal 29 Maret 2016.
- Furry, Ratri. 2013. *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah*. Semarang:UNDIP.
- Peraturan Pemerintah No. 23/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota (www.hukumonline.com).
- Peraturan Pemerintah No. 39 /2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (www.hukumonline.com)
- Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah (www.indonesia.go.id).
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional*. Padang: Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Grafindo P0ersada.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset